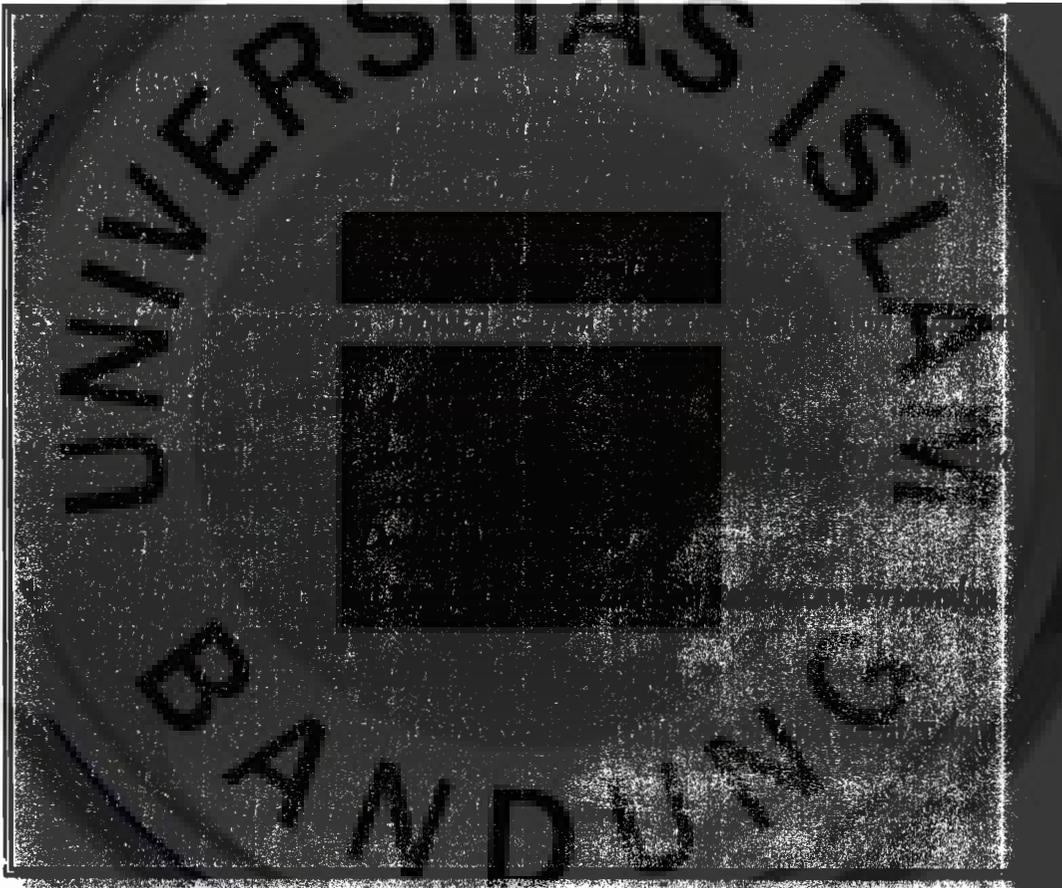


# DINAMIKA ekonomia

JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Volume 3 No.2 September 2007

ISSN 1693-0606



# Analisis Struktur dan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia

Oleh : Aan Julia<sup>1</sup> dan Adriana Mita Pratiwi<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia yang relatif pesat mendorong persaingan yang ketat antar di lingkungan perbankan. Persaingan yang ketat ini menuntut masing-masing bank perlu mengetahui posisi perusahaannya dalam struktur pasar yang dihadapinya, dan upaya memperbesar pangsa pasarnya maka masing-masing bank perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaannya selama ini.*

*Melalui penelitian ini akan terlihat bagaimana gambaran bentuk pasar yang dihadapi Bank Syariah di Indonesia dan faktor-faktor yang menentukan bentuk pasar tersebut. Kemudian bagaimana kinerja Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tahun 2006 dan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi persaingan usaha Bank Syariah dan mengacu pada teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.*

*Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa bentuk struktur pasar Bank Syariah di Indonesia adalah Pasar Oligopoli dengan tingkat konsentrasi moderat tinggi, baik dilihat dari penguasaan asset, penghimpunan dana pihak ketiga maupun dilihat dari penyaluran kreditnya. Sementara kinerja Bank Syariah menunjukkan pencapaian kinerja yang relative baik dilihat dari aspek tingkat kecukupan modal (CAR), tingkat profitabilitas (ROA) dan rasio pembiayaan (FDR), sehingga diharapkan akan mendorong perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.*

**Kata Kunci :** Bank Syariah, Struktur Pasar, Kinerja, CAR, ROA dan FDR.

### 1. Pendahuluan

Industri perbankan masih menjadi sendi terpenting dalam perekonomian nasional. Sejarah perekonomian menunjukkan bahwa ekonomi bergerak seiring dengan industri perbankan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu upaya memperkuat sistem perbankan yang sehat, efisien, dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional.

<sup>1</sup>Aan Julia, SE. M.Si adalah Dosen Tetap Program Studi IE UNISBA

<sup>2</sup> Adriana Mita Pratiwi, SE. adalah alumni Program Studi IE UNISBA

Melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang disusun oleh Bank Indonesia guna memperkuat fundamental industri perbankan nasional maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah struktur perbankan yang sehat disamping perlu adanya pengawasan dan pengaturan yang efektif. (Sugiarto, 2003)

Perbankan Syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, perkembangan Bank Syariah sendiri relative lambat di Indonesia, baru pada tahun 2006 jumlah bank syariah di Indonesia baik kelompok bank umum syariah maupun unit usaha syariah berjumlah 23 unit usaha. Perkembangan kegiatan usaha perbankan syariah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, dimana secara keseluruhan jumlah total aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah cenderung meningkat.

Tabel 1. Perkembangan Nilai Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia tahun 2006 (trilyun rupiah)

Deskripsi	1999	2003	2006
Total Aset	1.125	7.944	26.722
Dana Pihak Ketiga	0.173	5.759	20.672
Pembiayaan	0.538	5.561	20.445

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2006, Bank Indonesia

Dilihat dari jumlah aset yang dimiliki hingga bulan Desember 2006 secara keseluruhan mencapai Rp. 26.772 trilyun dengan total pangsa pasar terhadap total aset perbankan nasional sebesar 1.62 %. Meskipun jumlah tersebut masih kecil namun kondisi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.42 %. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pasar yang belum tersentuh merupakan indikasi yang menjanjikan sekaligus menantang.

Pangsa pasar perbankan syariah yang masih rendah bila dibandingkan perbankan konvensional tidak terlepas dari karakter industri perbankan syariah yang sangat spesifik. Secara umum baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional pada prinsipnya keduanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan tujuan tersebut, Bank Syariah dituntut untuk berkembang dan menjadi lembaga finansial yang bonafid dan professional. Artinya bahwa Bank Syariah dalam manajemen investasi dan finansial dituntut untuk menggunakan asas *profit oriented* sebagaimana bank konvensional menjalaninya sehingga dengan asas tadi. Bank Syariah bisa berkembang, bukan sekedar menggunakan jalur emosional keagamaan untuk menjangkau nasabahnya. Itulah salah satu persamaan yang bisa

dijadikan referensi dan motivasi dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan Perbankan Syariah.

Di sisi lain, Bank Syariah juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diembannya, yaitu menjalankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Syariah, dimana usaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu harus didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Syariah, biasanya banyak diulas dalam kitab-kitab fiqh dan ijihad ulama-ulama kontemporer, baik individu maupun kelompok. Oleh karena itu Perbankan Syariah di Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri; baik konsep Bank yang dinamis dan inovatif, ataupun sumber daya manusianya yang *capable* dan *professional* untuk mengambil alih peran dalam mengendalikan perekonomian umat.

Dalam upaya memperluas pangsa pasarnya bank syariah menghadapi industri yang didalamnya terjadi dua persaingan sekaligus, yaitu persaingan antar bank syariah dan persaingan dengan bank konvensional yang telah eksis sejak lama. Selain itu potensi masuknya pemain baru dalam industri perbankan syariah sangat terbuka. Hal ini dimungkinkan oleh adanya dukungan peraturan pemerintah, pembelajaran dari sistem perbankan konvensional, biaya pengalihan yang rendah dari sistem perbankan konvensional.

Untuk terus mendorong pengembangan industri perbankan syariah yang dianggap masih berpotensi besar, Bank Indonesia pada tahun 2006 terus menempuh berbagai langkah kebijakan sesuai dengan *blue print* yang diterbitkan pada tahun 2002. Formulasi cetak biru dilandasi beberapa norma yang diyakini berpotensi lebih mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan yang ditempuh sepanjang tahun 2006 merupakan implementasi tahap kedua cetak biru tersebut, yakni difokuskan pada upaya memperkuat struktur industri perbankan syariah. Disamping itu kebijakan yang ditempuh juga diarahkan untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional guna menjaga pertumbuhan industri perbankan syariah.

## 2. Permasalahan

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas bahwa memiliki struktur perbankan yang sehat memang diperlukan oleh Bank Syariah agar mampu beroperasi secara efisien. Dengan pendekatan *economic of scale* agar Bank Syariah dapat beroperasi secara efisien maka bank tersebut haruslah memiliki skala usaha, asset dan permodalan yang cukup besar. Sebaliknya masalah *economic of scale* sangatlah sulit dicapai jika kemampuan bank sangat terbatas. Struktur perbankan yang sehat tentu saja menjadi faktor kunci untuk menjamin kinerja bank-bank menjadi lebih efisien. Kinerja bank yang efisien memungkinkan bank dapat menekan biaya serendah mungkin sehingga bank tersebut mampu meningkatkan profitabilitasnya, dan pada akhirnya akan menjadi pendorong bagi bank tersebut untuk meningkatkan terus pangsa pasarnya.

Dengan demikian maka dalam penelitian ini akan kita lihat bagaimana bentuk struktur pasar Perbankan Syariah di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menentukan posisi pasar tersebut. Kemudian akan diketahui pula bagaimana kinerja bank syariah selama ini yang pada akhirnya akan menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih bank tersebut sehingga pangsa pasarnya akhirnya akan meningkat pula.

## 3. Tinjauan Teoritis

Secara umum bank memiliki peran yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian. Peran strategis tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank merupakan lembaga perantara keuangan terbesar (*financial intermediary*), dimana bank sebagai prasarana pendukung yang sangat vital dalam menunjang kelancaran perekonomian. Intermediasi keuangan ini dapat dikatakan sebagai aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian, hal ini terjadi karena intermediasi keuangan mengizinkan dana-dana untuk ditransfer dari orang yang mengalami surplus dana ke orang-orang yang membutuhkan dana. Dengan demikian intermediasi keuangan membantu meningkatkan perekonomian lebih efisien.

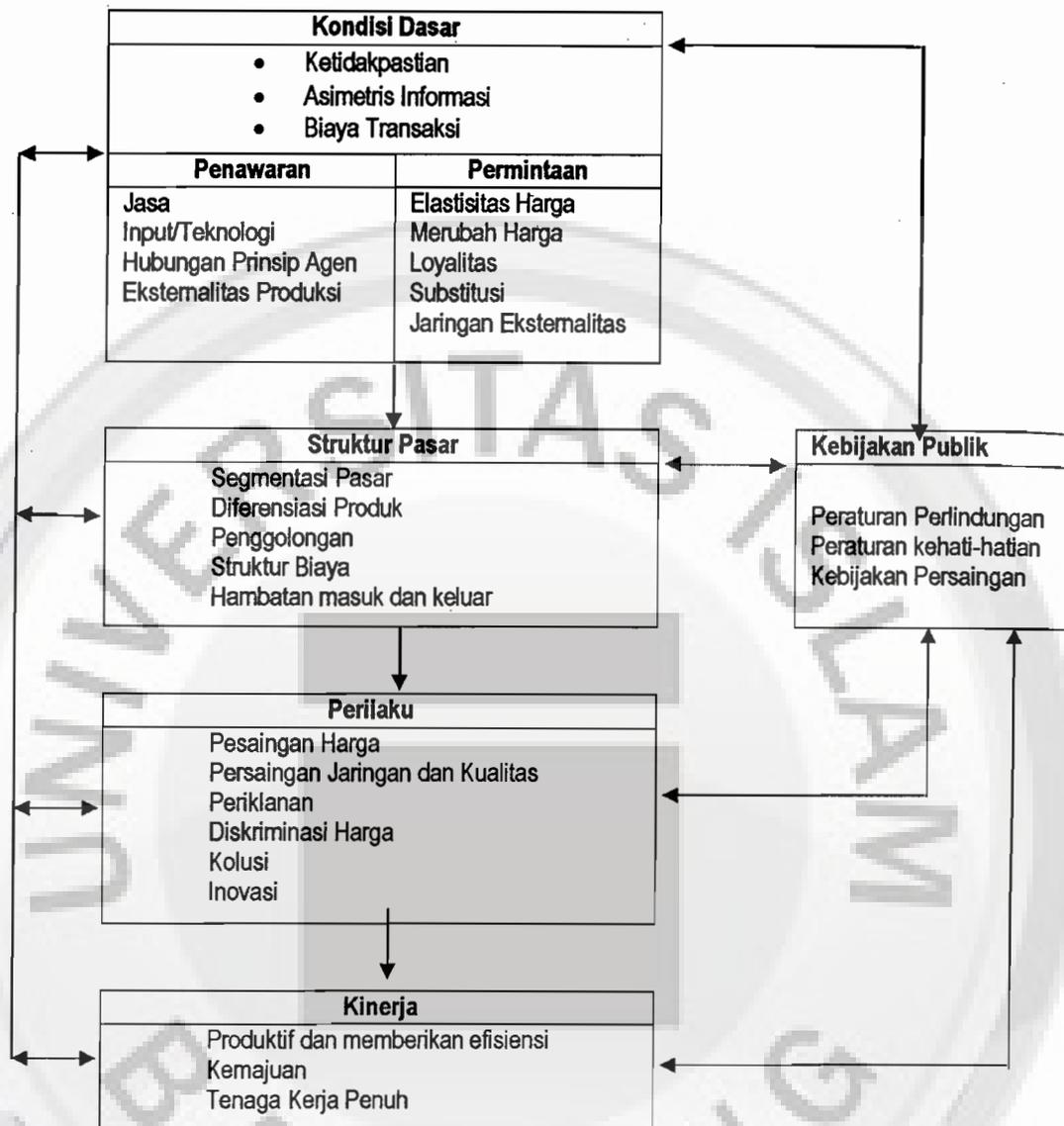
Pengertian industri sangat luas dalam lingkup makro maupun mikro sebagaimana telah dijelaskan dalam teori ekonomi mikro. Industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang mempunyai sifat saling menggantikan sangat erat. Sedangkan dari segi makro pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. (Hasibuan, 1994)

Untuk menggunakan paradigma analisis pasar perbankan ini, kita menggabungkan pasar tidak sempurna (ketidakpastian, informasi asimetris,

dan biaya transaksi) ke dalam kondisi dasar. Khususnya pembentukan asimetris antara peminjam dan pemberi pinjaman dan biaya mengumpulkan informasi mempunyai pengaruh pada kegiatan bank, struktur dan kinerja. Variabel penting pada kondisi dasar adalah resiko, sikap terhadap resiko, dan hubungan prinsip-agen. Mereka mempunyai pengaruh pada struktur pasar (penggolongan), perilaku (mengumpulkan informasi, mengambil resiko) dan kinerja (alokasi resiko dan informasi). (Neuberger, 1997)

Menurut Neuberger, pada kondisi penawaran, jasa bank terdiri dari fungsi menyediakan likuiditas, informasi dan transformasi (resiko, ukuran), dan peranan modal bank berperan penting untuk melindungi deposan dari resiko kegagalan bank. Kondisi penawaran bergantung pada hubungan prinsip agen dan cara untuk meminimalkan biaya agen. Sedangkan kondisi permintaan, dapat dikarakteristikan dengan jaringan eksternalitas cabang dari sistem ATM.

Bank adalah tipe perusahaan dengan tipe multiproduk yang aktif pada pasar deposito, pasar pinjaman dan pasar jaminan. Produk-produk tersebut memberi arti sebuah pasar yang memuaskan kebutuhan (likuiditas, keamanan, keuntungan) dan penghubung yang kuat bagi substitusi. Adapun produk yang disediakan oleh bank syariah antara lain prinsip simpanan/titipan (Al Wadiah), prinsip bagi hasil (Al Mudharabah, Al Musyarakah), prinsip jual beli (Al Murabahah), prinsip sewa (Al Ijarah). (Antonio, 2001)



Gambar 1. Rangkuman Kerangka Kerja SCP untuk Pasar Perbankan.  
 Sumber : Neuberger, 1997

Struktur pasar pada industri perbankan menunjukkan atribut-atribut dari pasar yang dapat mempengaruhi proses dan intensitas persaingan antar bank dalam industri. Struktur pasar dapat mencerminkan tingkat kompetisi antar pelaku di dalam pasar tergantung dari jenis pasar yang dihadapinya. Cara untuk mengukur tingkat persaingan atau struktur pasar dalam pasar

*Analisis Struktur dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*  
 (Aan Julia dan Adriana Mita Pratiwi)

perbankan antara lain jumlah kantor bank dalam pasar, pangsa pasar (*market share*), perkembangan konsentrasi pasar dan distribusi kantor cabang di daerah, kondisi kemudahan dan hambatan masuk ke dalam suatu industri, diferensiasi produk dan termasuk pilihan kebijakan yang menyangkut unit atau *branching system*. (Kidwell dan Peterson 1995).

Pangsa pasar (*market share*) adalah rasio penjualan suatu perusahaan dalam unit atau satuan uang terhadap penjualan total industri dalam unit atau satuan uang, atau didasarkan rasio lain yang masih potensial pada periode waktu tertentu. Dalam menentukan pangsa pasar perbankan syariah akan dilihat bagaimana penguasaan bank syariah tersebut dalam penguasaan aset, penghimpunan dana pihak ketiga dan dalam penyaluran kredit bank.

Pangsa pasar yang dikuasai oleh sebuah perusahaan dapat menunjukkan indikator derajat kekuatan monopoli, semakin besar penguasaan pasar (pangsa pasarnya) maka semakin besar kekuatan monopoli dan biasanya perusahaan akan menghadapi persaingan dengan tekanan yang cukup kuat. Sementara itu, konsentrasi pasar yang merupakan kombinasi pangsa pasar beberapa pemain dominan mencerminkan kekuatan oligopoli, dan bila terkoordinasi dengan ketat dapat mendekati karakteristik monopoli. (Sheperd, 1990). Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan pangsa pasar masing-masing bank adalah sebagai berikut :

$$MS = \frac{S_i}{\sum S} \times 100\%$$

Dimana :  $S_i$  = jumlah aset/dana pihak ketiga/ pembiayaan yang dikurukkan oleh bank ke  $i$

$S$  = total aset/dana pihak ketiga/pembiayaan yang dikurukkan dari seluruh bank yang diamati.

Rasio konsentrasi mengukur persentase yang menguasai pasar dengan melihat penguasaan pasar yang paling besar. Secara teori bahwa rasio konsentrasi dalam menaikkan pangsa pasar, mengurangi persaingan karena satu bank atau kelompok bank kecil mempunyai pengaruh yang lebih kuat untuk ukuran total pasar tersebut. Nilai dari rasio konsentrasi industri merupakan dasar untuk menentukan struktur pasar suatu industri. Untuk mengukur rasio konsentrasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$CR_m = \sum_{i=1}^m MS_m$$

Dimana :  $CR_m$  = nilai rasio konsentrasi dari  $m$  perusahaan terbesar

$m$  = jumlah bank yang memiliki MS terbesar

$MS_m$  = nilai pangsa pasar bank terbesar

Untuk menentukan bentuk pasar atau struktur pasar bank syariah maka nilai rasio konsentrasi tersebut disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bain sebagai berikut :

1. Monopoli Murni : apabila satu perusahaan menguasai 100 % pangsa pasar.
2. Perusahaan Dominan : apabila satu perusahaan memiliki 50 – 100 % pasar tanpa pesaing yang sepadan.
3. Oligopoli Ketat : apabila penggabungan 4 perusahaan terbesar memiliki total pangsa pasar 60 – 100 %. Dalam struktur pasar seperti ini kesepakatan dalam menetapkan harga relatif mudah.
4. Oligopoli Longgar : apabila penggabungan 4 perusahaan besar memiliki total pangsa pasar 40 % atau kurang. Kesepakatan dalam menetapkan harga diantara mereka sebenarnya tidak mungkin dilakukan.
5. Persaingan monopolistik : apabila terdapat banyak pesaing yang efektif, namun tidak satupun dari mereka yang memiliki pangsa pasar lebih dari 10 %.
6. Persaingan murni : apabila ada lebih dari 50 perusahaan atau pesaing, namun tidak satupun dari mereka yang memiliki pangsa pasar yang berarti. (Martin, 1994)

Diferensiasi produk adalah strategi lain untuk kekuasaan pasar, yang bertujuan untuk pengembangan jenis-jenis produk tersendiri dan untuk memperkuat *brand image* yang menguntungkan antara nasabah terakhir dan distributor. Perusahaan dapat melakukan diferensiasi produk melalui *non price competition* seperti desain dan iklan. (ibid)

Kinerja perusahaan dapat diukur dalam produksi (biaya dan profit) efisiensi dan alokasi efisiensi (kekuatan pasar). Produktif artinya biaya efisiensi dinaikkan, jika biaya per unit dikurangi untuk memberi seperangkat jumlah output dan harga input, dan profit efisiensi dinaikkan, jika kombinasi input tinggi dan output dicapai. Sedangkan untuk mengukur efisiensi, input dan output harus dihubungkan antara satu dengan yang lain. Ukuran output dapat dilihat dari jumlah deposito, pinjaman sedangkan tenaga kerja, modal fisik dan dana pembelian sebagai input. (Neuberger, 1997)

Pendekatan penilaian kinerja perbankan bisa dilihat dari aspek; permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas dengan memberikan bobot tertentu dan melalui beberapa indikator kinerja (*performance indicator*). Disisi lain, kinerja perbankan juga dapat dinilai dari efisiensi. Secara teoritis, efisiensi ekonomi diartikan efisien secara teknik ketika mampu mencapai output optimum dengan jumlah input tertentu pada tingkat teknologi tertentu. Efisiensi alokatif terjadi ketika penggunaan output dan input mencapai yang terbaik, sehingga tidak ada penambahan output lebih lanjut atau sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang mungkin. (Folland, dkk, 1993).

Menurut Favero dan Papi (1995) ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengukur kinerja perbankan antara lain pendekatan produksi yakni menekankan peran bank dalam menyediakan jasa pelayanan simpan dan pinjam. Kedua, pendekatan intermediasi yang menekankan pada fungsi bank sebagai penghubung pelaku ekonomi yang surplus dan defisit. Aktivitas bank sebagai lembaga perantara ini mengacu pada bagaimana bank mentransformasikan dana yang diperoleh dari tabungan dan pihak lain menjadi pinjaman dan investasi keuangan.

Kinerja suatu bank juga dapat diukur melalui rasio keuangan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan bank, untuk mengetahui perkembangan perbankan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasi dan penyusunan rencana kerja anggaran bank, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan di masa yang akan datang. (Budisantoso, dkk)

Bank Indonesia sendiri telah menetapkan kriteria-kriteria mengenai kinerja sebuah bank melalui SK DIR BI No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Faktor-faktor utama yang dinilai dan sangat mempengaruhi kesehatan suatu bank adalah :

Tabel 2. Faktor-faktor Utama Kesehatan Bank

No	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1	Permodalan	1. CAR	25 %
2	Kualitas Aktiva Produktif	1. Rasio aktiva yang dikualifikasi terhadap aktiva produktif	25 %
		2. Rasio cadangan penghapusan terhadap aktiva yang dikualifikasi	5 %
3	Manajemen	1. Manajemen Umum	10 %
		2. Manajemen Resiko	15 %
4	Rentabilitas	1. Rasio laba terhadap total aset	5 %
		2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5 %
5	Likuiditas	1. Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti	5 %
		2. Rasio kredit terhadap DPK	5 %

Sumber : Lukman Dendawijaya, 2000. Manajemen Perbankan

Dalam tulisan ini untuk mengukur prestasi atau kinerja perbankan yang dicapai dari tujuan struktur dan perilaku industri hanya menggunakan 3 kriteria yaitu : Likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.

Analisis rasio likuiditas adalah analisa yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Untuk mengukur likuiditas diwakili oleh indikator *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yaitu rasio untuk mengukur likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan dan jumlah dana pihak ketiga. Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia bahwa nilai FDR yang diperbolehkan maksimal 110 %. Rumus untuk menghitung FDR adalah sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rentabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank bersangkutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur rentabilitas diwakili oleh ROA (*Return on Asset*) yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Adapun kriteria yang digunakan adalah suatu bank dikatakan sehat apabila rasio laba terhadap volume usaha mencapai sekurang-kurangnya 1,5 %. Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Sedangkan indikator solvabilitas diwakili oleh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung/menghasilkan resiko. Modal bank dianggap cukup apabila telah mencapai minimal sebesar 8 %. Dan rumus untuk menghitung CAR adalah sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Resiko}} \times 100 \%$$

#### 4. Kondisi Umum Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan riba, kegiatan spekulatif yang dikategorikan serupa dengan perjudian, ketidakjelasan dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

**Tabel 3. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia  
Berdasarkan Tahun Berdiri**

Bank Syariah	Periode			
	1992 – 2003	2004	2005	2006
Bank Umum Syariah	1. Bank Muamalat Indonesia 2. Bank Syariah Mandiri	3. Bank Syariah Mega Indonesia		
Unit Usaha Syariah	1. Bank IFI 2. BNI 3. Bank Jabar 4. BRI 5. Bank Danamon 6. Bank Bukopin 7. BII 8. HSBC	9. Bank DKI 10. BPD Riau 11. BPD Kalsel 12. Bank Niaga 13. Bank Sumut 14. Bank Permata 15. BPD Aceh	16. BTN 17. BPD NTB 18. BPD Kalbar 19. BPD Sumsel	20. BPD Kaltim

Sumber : Majalah Info Bank, 2006

Pesatnya perkembangan bank syariah baru terasa sejak pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen yang besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius melalui Undang Undang Perbankan No. 7/1992 diganti dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah, tetapi juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia mengenai *dual banking system* yang memberi ijin kepada bank konvensional untuk mendirikan Unit usaha Syariah.

Sepanjang tahun 2006, pertumbuhan volume usaha perbankan syariah mencapai 28 % atau meningkat sebesar Rp. 5,8 triliun, kemudian pembiayaan yang diberikan meningkat sebesar Rp. 5,2 triliun dari tahun sebelumnya sehingga mendorong kenaikan rasio FDR syariah dari 97,8 % pada akhir tahun 2005 menjadi 98,9 %. Dalam periode yang sama jumlah DPK yang dihimpun meningkat sebesar Rp. 5,1 triliun, dan hampir semua dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut disalurkan oleh perbankan syariah.

Struktur dana bank syariah masih didominasi oleh dana investasi mudharabah yang terdiri dari tabungan dan deposito, namun secara perlahan bergeser ke dana berbasis wadiah (simpanan). Hal tersebut mengindikasikan preferensi likuiditas masyarakat yang cenderung meningkat sepanjang waktu. Namun komposisi dana yang demikian berpotensi meningkatkan risiko likuiditas bagi bank, khususnya yang bersumber dari fluktuasi dana kelompok deposan korporasi, yang pada umumnya lebih

*Analisis Struktur dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*  
(Aan Julia dan Adriana Mita Pratiwi)

sensitif terhadap daya saing bagi hasil yang ditawarkan. Kelompok deposito ini meskipun jumlahnya sangat kecil yang hanya 2,3 % namun jumlah dana yang ditempatkan sangat besar (diatas 50 % dari total dana yang dihimpun) sehingga dampak pergerakannya lebih sulit diantisipasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 yang memperlihatkan perkembangan komposisi penghimpunan dana dan penyaluran dana pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 4. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

Keterangan	Jumlah (milyar)		Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
<b>DANA PIHAK KETIGA</b>	<b>15.582</b>	<b>20.672</b>	<b>31,4</b>	<b>32,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Simpanan Wadiah</i>						
Giro	2.045	3.416	26,2	67,0	13,1	16,5
Tabungan	60	122	35,5	105,0	0,4	0,6
Lainnya	130	210	379,3	61,6	0,8	1,0
<i>Investasi Mudharabah</i>						
Tabungan	4.181	6.098	31,0	45,9	26,8	29,5
Deposito	9.166	10.826	31,4	18,1	58,8	52,4
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>15.232</b>	<b>20.445</b>	<b>32,6</b>	<b>34,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Musarakah	1.898	2.335	49,4	23,0	12,5	11,4
Mudharabah	3.124	4.062	51,5	30,0	20,5	19,9
Piutang Murabahah	9.487	12.624	24,2	33,1	62,3	61,7
Piutang Istishna	282	337	10,0	19,6	1,8	1,6
Qard	125	250	26,2	100,6	0,8	1,2
Ijarah	316	836	201,8	164,7	2,1	4,1

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit menunjukkan kondisi tumbuh sebesar 34,2 % atau melebihi laju pertumbuhan DPK yang berhasil dihimpun selama tahun 2006. Di tengah kondisi perbankan nasional yang masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan penyaluran dana ke berbagai sektor produksi, perkembangan pembiayaan dimaksud menjadi sangat berarti dan mampu mengangkat pangsa pembiayaan perbankan syariah pada skala perbankan nasional dari 2,2 % pada tahun 2005 menjadi 2,6 %. Meskipun demikian, belum membaiknya iklim investasi menyebabkan terjadinya pergeseran

portofolio pembiayaan bank syariah. Hal ini ditandai oleh merosotnya pembiayaan investasi, sementara pembiayaan konsumsi terus meningkat.

Berdasarkan jenis akad yang digunakan, pangsa kelompok pembiayaan untuk sewa (ijarah) meningkat cukup pesat dengan laju pertumbuhan 164,7 % pada tahun 2006, sementara untuk mudharabah dan musyarakah justru mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2005. Sementara pangsa pasar pembiayaan murabahan (jual beli) dengan dominasi yang cukup besar yaitu 62,3 % pada tahun 2005 namun menurun di tahun 2006 menjadi 61,7%. Fenomena pesatnya perkembangan ijarah karena adanya fleksibilitas yang dimiliki bank untuk menetapkan besarnya sewa yang harus dibayar oleh nasabah dari satu periode ke periode lainnya. Fleksibilitas ini dinilai sangat membantu bank syariah dalam mempertahankan daya saing dengan produk-produk pembiayaan jangka panjang, seperti pembiayaan pengadaan mesin produksi dan kepemilikan properti.

Pertumbuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi di tengah kondisi sektor riil yang belum kondusif ternyata telah meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah (NPL) yang dihadapi perbankan syariah. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan bank syariah khususnya pada sektor industri, transportasi dan konstruksi. Berbagai upaya yang dilakukan perbankan syariah untuk menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah ternyata belum sepenuhnya dapat mengurangi kesenjangan antara laju pertumbuhan pembiayaan bermasalah dengan laju pertumbuhan jumlah pinjaman yang disetujui. Hal tersebut terlihat dari nilai rasio NPL yang meningkat dari 2,8 % pada tahun 2005 menjadi 4,8 % pada akhir tahun 2006.

Dalam perkembangannya, peningkatan resiko dalam penghimpunan maupun penyaluran dana dapat diantisipasi dengan baik oleh perbankan syariah. Laju peningkatan laba sedikit terhambat dengan tingkat *return on asset* yang masih kecil yaitu sebesar 0,73 %. Hal tersebut karena kenaikan pangsa pendapatan operasional dialokasikan sebagai penambah bagi hasil kepada deposan, sebagai upaya mempertahankan daya saing. Selain itu untuk mengantisipasi resiko pembiayaan, beban pembentukan cadangan juga ditingkatkan sehingga kondisi permodalan bank syariah tetap terjaga dalam kisaran rasio kecukupan modal yang masih di atas batas minimal.

##### **5. Analisis Struktur Pasar Bank Syariah di Indonesia**

Dalam konsep *Industrial Organization*, struktur industri atau struktur pasar akan dikaitkan dengan perilaku dan kinerja perusahaan. Berbicara tentang struktur pasar akan termasuk didalamnya kondisi kemudahan dan

hambatan masuk ke dalam suatu industri, diferensiasi produk dan skala ekonomi. (Neuberger, 1997)

Untuk mengetahui bagaimana bentuk pasar dan ketatnya persaingan di perbankan syariah dalam masalah penguasaan aset, penghimpunan dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit maka perlu kita perhatikan dahulu bagaimana penguasaan pasar dari masing-masing bank syariah untuk masing-masing komponennya seperti yang terlihat dalam tabel 5 berikut ini.

Jika kita perhatikan data struktur pada tabel di atas, terlihat bahwa penguasaan pasar atas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran kredit dikuasai oleh 4 bank yang sama (lihat 4 ranking terbesar dari masing-masing komponen) yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Indonesia dan BNI Syariah dengan urutan tetap.

Dengan memperhatikan nilai CR 4 atau penguasaan pasar 4 bank terbesar dari ketiga komponen tersebut dapat ditentukan bentuk pasar perbankan syariah di Indonesia menurut kriteria Bain adalah bentuk pasar Oligopoli ketat atau Oligopoli dengan tingkat konsentrasi moderat tinggi. Menurut kriteria Bain apabila jumlah penguasaan pasar 4 perusahaan terbesarnya antara 60 – 100 % maka berada dalam bentuk pasar seperti yang telah disebutkan diatas. Dari tabel terlihat nilai CR 4 baik menurut aset, DPK dan pembiayaan selalu berada diatas 80 % (atau berturut turut sebesar 82,69 % ; 90,27 % dan 83,21 %). Artinya kurang dari 20 % pangsa pasar tersebar di 18 bank syariah lain sisanya.

**Tabel 5. Posisi Penguasaan Pasar dan Kinerja  
Bank Syariah di Indonesia, per September 2006**

No	Bank Syariah	Struktur (%)			Kinerja (%)		
		MS Aset	MS DPK	MS Kredit	CAR	ROA	FDR
1	Bank Syariah Mandiri	36.62	41.48	36.74	11.95	0.95	95.43
2	Bank Muamalat Indonesia	33.19	34.82	33.11	14.65	2.36	102.45
3	Bank Syariah Mega Indonesia	7.42	8.59	7.93	9.30	1.61	99.52
4	BNI Syariah	5.46	5.38	5.43	16.08	0.89	108.68
5	BRI Syariah	4.13	1.65	4.87	13.29	0.84	317.86
6	Bank Niaga Syariah	2.00	1.18	2.10	9.27	0.82	191.60
7	Bank Bukopin Syariah	1.60	1.34	1.63	8.51	0.35	131.16
8	Bank Jabar Syariah	1.59	0.43	1.37	10.43	0.92	340.99
9	Bank Danamon Syariah	1.50	1.11	0.85	9.11	0.80	82.61
10	BTN Syariah	1.45	0.49	1.12	8.11	0.65	249.40
11	HSBC Syariah	1.39	1.02	1.64	8.06	0.27	174.54
12	Permata Bank Syariah	1.03	0.81	0.93	11.21	0.78	123.42
13	BII Syariah	0.61	0.57	0.65	8.13	0.36	123.25
14	BPD Aceh Syariah	0.53	0.42	0.24	9.05	0.69	60.11
15	Bank DKI Syariah	0.40	0.15	0.42	9.15	0.75	97.87
16	BPD Sumut Syariah	0.26	0.13	0.24	8.29	0.53	195.18
17	BPD Sumsel Syariah	0.23	0.06	0.26	8.18	0.60	445.47
18	BPD Riau Syariah	0.23	0.14	0.23	8.24	0.32	176.29
19	Bank IFI Syariah	0.13	0.11	0.05	8.04	0.56	50.15
20	BPD Kalsel Syariah	0.11	0.08	0.08	8.16	0.45	112.65
21	BPD NTB Syariah	0.07	0.01	0.08	8.07	0.42	762.21
22	BPD Kalbar Syariah	0.05	0.03	0.03	8.26	0.30	123.43
	<b>TOTAL</b>	100.00	100.00	100.00			
	<b>CR 4</b>	82.69	90.27	83.21			

Sumber : Majalah infobank, diolah.

Lemahnya penguasaan aset bank sisanya ada beberapa alasan, antara lain bahwa bank yang menguasai pasar adalah bank yang telah lama berdiri dibandingkan dengan bank lainnya. Terutama untuk bank daerah, mereka akan kesulitan menguasai jumlah pasar yang besar karena operasional bank tersebut terbatas didaerah yang bersangkutan, seperti

*Analisis Struktur dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia  
(Aan Julia dan Adriana Mita Pratiwi)*

Bank Jabar, BPD dan lain-lain. Tidak seperti bank syariah lain yang merupakan unit usaha syariah atau bank umum syariah lainnya yang dapat membuka cabang dimana saja di seluruh Indonesia. Bank-bank yang besar di atas memang telah memiliki jumlah cabang dan kantor cabang yang tersebar hampir diseluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dibahas bagaimana penguasaan pasar untuk setiap komponennya. Aset merupakan harta milik bank yang mempunyai manfaat ekonomi, yang terdiri dari aktiva produktif, yaitu pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang, deposito pada bank lain, penempatan aktiva pada SBI, aktiva antar bank, obligasi dan aktiva non produktif yaitu aktiva dalam bentuk tunai, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris, dan sebagainya.

Sampai periode September 2006, Bank Syariah Mandiri masih menjadi *market leader* dalam industri perbankan syariah di ketiga komponen yang diteliti. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi bahwa bank tersebut memiliki 57 kantor cabang, 59 cabang pembantu, 63 kantor kas dan 29 konter layanan syariah yang bekerjasama dengan induk perusahaan yaitu Bank Mandiri. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia memiliki 51 cabang, 8 cabang pembantu, 15 unit pelayanan syariah, 91 kantor kas dan 41 gerai muamalat. Hal yang mendorong Bank Syariah Mandiri lebih pesat dari Bank Muamalat Indonesia yang merupakan pelopor berdirinya bank syariah di Indonesia adalah karena mengikuti Bank Mandiri Konvensional yang sudah tersebar banyak, sehingga dengan layanan ATM yang bisa diakses di ATM Bank Konvensional menjadi daya tarik sendiri mengingat layanan ATM Bank Mandiri yang sudah sangat tersebar dibandingkan Bank Muamalat Indonesia.

Sementara dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga yang terdiri dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2005 seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Peningkatan DPK perbankan syariah dipicu kenaikan aksesibilitas outlet syariah, hal itu terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka *office channeling* hingga ke pedesaan. Dampaknya masyarakat lebih mudah mengenal dan memanfaatkan produk syariah yang ditawarkan.

Dalam DPK, Bank Syariah Mandiri juga masih menjadi penguasa pasar dana perbankan yang ditopang oleh peningkatan yang luar biasa dari

dana deposito mudharabah sebesar Rp. 12,77 triliun atau 58 persen dari total DPK yang dihimpun. Penguasaan pasar ini tidak terlepas dari banyaknya kantor cabang, pengembangan produk syariah seperti pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk perputaran usaha atau proses produksi, seperti pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Kemudian penguasaan pasar diikuti pula oleh BMI, peningkatan yang berarti sejak dikeluarkannya produk unggulan kartu *Shar-E* yang merupakan layanan investasi syariah berbasis teknologi yang dikombinasikan dengan ATM dan *debit card*.

Juga dalam pembiayaan, Bank Syariah Mandiri masih menjadi *market leader*. Tingginya pembiayaan yang disalurkan oleh BSM didominasi oleh piutang murabahah (jual beli) sebesar Rp. 13,34 triliun atau 60,68 persen dari total pembiayaannya. Pada tahun 2006 ini sebenarnya sebagian besar Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah melakukan ekspansi pembiayaan besar-besaran dengan strategi berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Salah satu strategi pembiayaan yang dimainkan beberapa bank syariah tahun ini adalah pembiayaan bersama (*joint financing*) dengan menggandeng perusahaan pembiayaan sepeda motor. Sebagai contoh Bank Mega Syariah Indonesia melalui kerjasama dengan PT. Federal International Financing (FIF) yang bergerak dalam pembiayaan sepeda motor berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar 94 persen untuk kredit sepeda motor. Sementara 6 persen sisanya pembiayaan BMSI untuk pembiayaan korporasi, komersial dan konsumsi (pembiayaan KPR). Dengan integrasi tersebut, bank dapat memanfaatkan strategi diversifikasi untuk menambah jumlah nasabah sekaligus mendorong porsi *fee based income* mereka.

Kemudian komitmen perbankan syariah yang besar dalam mengembangkan sektor riil cukup besar. Dari total pembiayaan disalurkan per September 2006 lalu, sebanyak 71,84 persen atau Rp. 14,007 triliun disalurkan untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah. Sedangkan pembiayaan non UKM hanya sebesar 28,16 persen.

Bentuk pasar yang oligopoli, secara teori ada beberapa ciri yang melekat, pertama, terdapatnya beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Hal ini memang terjadi dalam perbankan syariah dengan melihat nilai CR 4 seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kedua, produk dan jasa yang ditawarkan bersifat heterogen atau terdiferensiasi yang nampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aset dan modal bank. Artinya bank dengan modal terbatas memiliki tingkat diferensiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan bank dengan modal tinggi. Misalnya BSM memiliki diferensiasi yang tinggi karena mempunyai atribut fitur produk yang lebih lengkap dan mengkomunikasikan produk tersebut lebih menarik serta memberikan pelayanan dan kemudahan

bertransaksi dengan akses yang cepat, mudah dan aman, seperti memiliki layanan canggih berbasis Teknologi Informasi seperti *internet banking* dan *mobile banking* yang tentunya tidak berbiaya sedikit. Diversifikasi produk lainnya seperti dalam pembiayaan yang ditawarkan (seperti BMSI yang telah dijelaskan sebelumnya), jasa konsultasi, *investment banking*, dan sebagainya.

Ketiga, dalam rangka mempertahankan pelanggan atau memperluas pasar salah satu upaya yang dilakukan dalam pasar oligopoli adalah promosi yang gencar, seperti melalui iklan. Pengiklanan produk baru untuk dapat meraih pasar dari produk yang telah mapan, atau dari pelanggan baru dapat menjadi *barrier to entry* yang kuat, terutama karena kualitas produk baru belum teruji atau masih tidak menentu. Dengan promosi dan iklan, *customer* menjadi lebih cepat belajar memahami *positioning* dan diferensiasi perbankan syariah.

Namun sayangnya strategi ini belum dilakukan secara intensif dan bersama-sama, sehingga sampai saat ini belum bisa tercipta sebuah *brand image* yang kuat dan jelas yang bisa dipahami oleh *customer*. Saat ini baru BMI yang telah memiliki *positioning* kuat di benak nasabah, karena BMI telah membuktikan dengan meraih *Indonesian Best Brand Award*, dengan tolak ukur penilaian antara lain popularitas merek, popularitas iklan, tingkat kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Hal tersebut tidak terlepas dari persentase iklan antara sesama Bank Syariah, BMI memegang porsi 36 %, sementara BSM hanya 8 %, sedangkan BRI Syariah dan BNI Syariah masing-masing hanya sebesar 7 %. Sehingga BMI terus mengembangkan infrastrukturnya di bidang teknologi informasi, jaringan dan sumber daya manusia.

Keempat, berkaitan dengan kebijakan penetapan harga. Dalam persaingan di perbankan syariah harga yang ditawarkan sesuai dengan konsep syariah yaitu sistem bagi hasil yang ditawarkan. Di Indonesia bagi hasil yang ditawarkan disetiap bank cukup bervariasi, masing-masing menawarkan komposisi yang menarik dan tidak terdapat kesepakatan antar bank. Bagi hasil yang ditawarkan berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional, bagi hasil yang diberikan adalah hasil kinerja bank selama bulan tersebut sehingga bervariasi jumlahnya, sementara sistem bunga mengacu pada suku bunga *BI rate*.

## 6. Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia

Untuk mengetahui kinerja keuangan bank syariah dapat dilihat dalam tabel 5 diatas melalui indikator CAR, ROA dan FDR. Dari tabel tersebut terlihat bahwa prestasi atau kinerja bank syariah ternyata tidak seperti pada penguasaan pasar yang didominasi oleh 4 bank tertentu dengan urutan yang sama. Dalam kinerja terlihat cukup bervariasi, seperti BMSI tidak termasuk 4 ranking terbaik dalam komponen CAR. Sementara BRI Syariah yang dalam struktur pasar tidak menempati 4 terbesar namun dalam CAR justru menduduki posisi 4 besar. Untuk itu akan kita bahas untuk setiap komponen yang diteliti.

Analisis rasio solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiaya kegiatannya dan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan efisiensi pihak manajemen. Rasio ini diwakili oleh variabel CAR atau rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal merupakan jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung resiko. Sesuai dengan standard BI bahwa bank dinyatakan sehat bila nilai minimum CAR sebesar 8 %. Melihat data di atas ternyata seluruh bank syariah yang ada di Indonesia telah memenuhi syarat pemenuhan penyediaan modal minimalnya. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin tinggi kemampuan bank memenuhi modalnya dan semakin baik solvabilitasnya karena modalnya semakin mampu menutupi aktiva yang beresiko.

Pencapaian CAR tertinggi diraih oleh BNI Syariah sebesar 16,08% diikuti oleh BMI sebesar 14,56%. Namun mayoritas besarnya CAR bank syariah masih berkisar dilevel 8 %, meskipun telah melampaui batas minimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah masih harus waspada memperhatikan resiko usaha pada saat ini yang masih tinggi, sehingga perlu pengawasan yang ketat seperti penyaluran pembiayaan yang selektif. Konsekuensi pemenuhan CAR minimal 8 % adalah bank syariah wajib menaikkan modalnya apabila kurang dari 8%, misalnya melalui suntikan modal atau bank-bank harus menyisihkan cadangan-cadangannya untuk memperbesar modal, karena itu bank-bank mengurangi ekspansi pembiayaannya dan memindahkan kelebihan cadangan untuk permodalan.

Sementara rasio rentabilitas yang diwakili oleh variabel ROA secara keseluruhan yang mengindikasikan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bank dan kemampuan mengalokasikan asetnya berada pada level yang masih kecil yaitu rata-rata sebesar 0,73 %. Padahal idealnya nilai ROA minimal sebesar 1,5 % artinya setiap Rp. 100 bunga yang diterima bank sebesar Rp. 1,5 akan menjadi keuntungan bank. Dari 22 bank

syariah yang ada pada bulan September 2006, baru Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega Indonesia yang melampaui batas minimal. Kecilnya nilai ROA sangat terlihat pada bank-bank yang relatif baru berdiri.

Kecilnya nilai ROA harus menjadi perhatian bank syariah karena dapat menurunkan kepercayaan pihak-pihak yang akan melakukan investasi pada sektor perbankan, sehingga dapat meningkatkan resiko investasi pada sektor perbankan, khususnya bank syariah. Hal ini dikarenakan ROA merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dampak lain dari kecilnya nilai ROA adalah persentase bagi hasil yang kecil atau turun bagi para deposan. Tentunya ini akan berdampak pada *market share* dalam penghimpunan DPK.

Nilai ROA juga berkaitan erat dengan besarnya aset yang dimiliki sebuah bank. ROA rata-rata tertinggi dicapai oleh kelompok bank dengan aset Rp. 1 triliun ke atas. Sedangkan pada kelompok bank dengan nilai aset yang kecil rata-rata nilai ROA-nya pun rendah. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa variabel pangsa pasar memiliki pengaruh pada ROA, karena pangsa pasar yang besar atau meningkat akan berdampak positif terhadap efisiensi perbankan sehingga pada akhirnya kemampuan bank untuk mencetak laba juga akan meningkat.

Tingginya nilai ROA yang diperoleh oleh BMI menyebabkan bank tersebut mendapat julukan "*the most profitable bank*" menurut Majalah Infobank, 2006. Tingginya laba yang dihasilkan tidak terlepas pula dari upaya intensifikasi yang dilakukan oleh BMI seperti melakukan penghematan biaya operasional, sehingga biaya itu tidak akan menggerus laba perusahaan, dan usaha lain melalui optimalisasi penjualan produk Shar-E.

Analisis likuiditas yang diwakili oleh variabel FDR (*Financing to Deposit Ratio*) menunjukkan efektivitas peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Dari nilai yang terlihat dalam tabel 5 tampaknya bank syariah telah terbukti menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi tersebut yang terlihat dari nilai rata-rata LDR berada di kisaran 90 – 110 % (sesuai dengan standar BI) atau mencapai 108,84 % sedangkan rata-rata LDR Bank Konvensional hanya berada di kisaran 45 – 50 %. Artinya perbankan syariah terbukti benar-benar menyalurkan pembiayaan dan menggerakkan sektor riil melalui pembiayaan ke sektor UKM. Tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan dari bank syariah karena beberapa menganggap bahwa pembiayaan melalui sistem bagi hasil yang ditawarkan

oleh perbankan syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Namun jika kita lihat pada masing-masing bank, hanya BMI, BNI Syariah, BSMI dan BSM yang mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan kondisi yang sehat berkisar nilai 100%. Beberapa bank memiliki nilai FDR yang masih dianggap normal karena masih dalam kisaran nilai 85 – 110 %. Namun Bank Jabar Syariah, BRI Syariah, BPD Sumsel dan NTB Syariah memiliki nilai FDR yang jauh melebihi batas yang ditolelir yaitu rata-rata diatas 300 % bahkan ada yang mencapai 700 %. Artinya suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan up*) atau relatif tidak likuid, ini mengindikasikan bahwa bank tersebut sangat ekspansif tetapi kurang di dukung dana yang memadai. Untuk menjembatani kebutuhan dana untuk pembiayaan unit usaha syariah tersebut mendapat kucuran dana dari bank induk konvensional, namun ada modal yang ikut tersalurkan ke pembiayaan sehingga bank tersebut tidak mempunyai cadangan dana dari DPK, dan resiko yang dihadapi adalah naiknya resiko pembiayaan macet (*non performing loan, NPF*).

Tingginya FDR itu terutama disebabkan karena minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan sangat besar, contohnya BRI Syariah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 957,2 miliar sementara DPK sebesar Rp. 301,1 miliar. Hal ini bukan saja menunjukkan berjalannya fungsi intermediasi, namun juga menunjukkan adanya dukungan penuh dari kantor pusat bank-nak tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk pembiayaan syariah. Dampak tingginya FDR tersebut, dapat mempengaruhi kinerja bank syariah karena dana yang masuk tidak sebanding atau masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan yang seharusnya disalurkan.

## 7. Simpulan dan Saran

Melihat dari nilai pangsa pasar menurut pemilikan aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga, dan penyaluran kredit ternyata perbankan syariah di Indonesia memiliki bentuk pasar Oligopoli dengan tingkat konsentrasi moderat tinggi, artinya tingkat persaingan usaha pada bank syariah hanya terkonsentrasi pada 4 bank saja dimana penguasaan pasar totalnya lebih dari 80 % sehingga bank lain yang mencoba memperluas pangsa pasarnya perlu berupaya sangat keras untuk menandingi *market leader*. Kondisi tersebut tidak terlepas banyaknya kantor cabang, luasnya jangkauan pasar, dan sebagainya. Dan persaingan usaha diantara *market leader* tersebut tentunya sangat ketat, terlihat dari upaya promosi dan iklan yang dilakukan serta diferensiasi produk guna

mempertahankan pangsa pasar yang ada atau untuk lebih memperluas pasar baru.

Kinerja bank syariah dalam solvabilitas seluruhnya telah melampaui batas minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun dalam profitabilitasnya relatif masih kecil (hanya ada 2 bank yang mampu melampaui standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia). Kondisi ini perlu dicermati oleh para pelaku usaha bank syariah karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor dan juga nasabah yang sudah ada. Sementara dari tingkat likuiditasnya bank syariah sudah menunjukkan peran yang optimal sebagai lembaga intermediasi. Kondisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, hal tersebut mengindikasikan pula bahwa pembiayaan melalui sistem bagi hasil pada perbankan syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional.

## 8. Daftar Pustaka

- Antonio Syafi'i Muhammad. 2000. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Bank Indonesia, Jakarta
- Dendawijawa, Lukman. 2000. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Nurimansyah. 1994. *Ekonomi Industri; Persaingan Monopoli dan Regulasi*. LP3ES. Jakarta
- Jaya, Wihana Kirana. 2001. *Ekonomi Industri*. Edisi 2. PT. BPFE Yogyakarta.
- Kashmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 6. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Kidwell, David S dan Richard L Peterson. *Financial Institutions, Market and Money*. 3<sup>rd</sup> ed.
- Martin, Stephen. 1994. *Industrial Economic; Economica Analysis & Public Policy*. 2<sup>nd</sup> ed. Macmillan Publishing Company. New York
- Neuberger, Doris. 1997. *Structure, Conduct and Performance in Banking Markets*, Journal of Banking and Finance, Working Paper No. 12
- Sheperd, William G. 1990. *The Economics of Industrial Organization*. 3<sup>rd</sup>. Prentice Hall. New Jersey
- Sugiarto, Agus. 2003. *Mencari Struktur Perbankan Yang Ideal*.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Salemba 4. Jakarta
- Laporan Tahunan Bank Indonesia berbagai edisi
- Laporan Data Perbankan, Bank Indonesia, berbagai edisi
- Majalah Infobank, berbagai edisi